



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARY SETYAWAN
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 237096

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	4.460.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.049 m2/500 m2 di KAB / KOTA PACITAN, WARISAN Rp. 1.810.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/150 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 2.650.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	279.500.000
1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000		
2. MOBIL, KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR BEBEK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	93.600.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	38.497.860
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.871.597.860
III. HUTANG	Rp.	185.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.686.597.860

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.